

PERANCANGAN ULANG KANTOR KEJAKSAAN TINGGI RIAU DENGAN PENDEKATAN AKTIVITAS

Salsabila Ayuandira Andri¹, Aida Andrianawati², dan Rangga Firmansyah³

^{1,2,3} *Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi No 1, Terusan Buah Batu – Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40257*
salsabilaayuandira@student.telkomuniversity.ac.id, andriana@telkomuniversity.ac.id,
ranggafirmansyah@telkomuniversity.ac.id

Abstrak: Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Kantor Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang bertugas memimpin suatu Provinsi. Pada Provinsi Riau terdapat Kantor Kejaksaan Tinggi yang bertugas dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang hukum khususnya pada bidang penuntutan. Bidang-bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda beda akan tetapi saling berhubungan, hubungan tersebutlah yang menciptakan aktivitas kerja yang beragam pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Aktivitas kerja yang terjadi pada lingkungan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini menimbulkan suatu budaya kerja yang terbentuk secara formal dan terstruktur. Aktivitas kerja ini sangat umum dijumpai pada lingkungan kerja kantor pemerintahan. Akan tetapi setelah melakukan observasi ditemukan permasalahan yang menyangkut aktivitas kerja pegawai kantor tersebut, seperti peletakan *zoning* dan *blocking* pada gedung yang kurang efektif, sehingga berpengaruh pada efektivitas kerja pegawai kantor. Maka dari itu diperlukan perancangan ulang interior Kantor Kejaksaan Tinggi Riau menggunakan pendekatan aktivitas. Pendekatan aktivitas dipilih untuk menelaah dan mempelajari aktivitas yang dilakukan pekerja kantor. Hal ini dilakukan agar dapat menemukan solusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Kata kunci: perancangan ulang, Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, aktivitas

Abstract: *The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a state institution that exercises state power, especially in the field of prosecution. The High Prosecutor's Office is located in the Provincial Capital in charge of leading a Province. In Riau Province there is a High Prosecutor's Office which is tasked with exercising state power in the field of law, especially in the field of prosecution. These fields have different tasks but are interconnected, it is this relationship that creates diverse work activities at the Riau High Prosecutor's Office. The work activities that occur within the Riau High Prosecutor's Office create a work culture that is formed formally and structured. This work activity is very common in the work environment of government offices. However, after making observations, problems were found regarding the work activities of office employees, such as the placement of zoning and blocking in buildings that were less effective, thus affecting the effectiveness of office employee work. Therefore, it is necessary to redesign the interior of the Riau High Prosecutor's Office using the Activity Approach. The activity approach was chosen to examine and study the activities carried out by office workers. This is done in order to find solutions in creating a better work environment.*

Keyword: *Redesign, Riau High Prosecutor's Office, Activities*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut Undang Undang no 16 tahun 2004 Pasal 2, pelaksanaan kekuasaan negara oleh Kejaksaan dibagi menjadi tiga kedudukan yaitu Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dengan wilayah kekuasaan provinsi Riau ini memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang hukum khususnya pada bidang penuntutan dan tugas tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum, untuk melaksanakan tugas tersebut, kantor ini dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, serta memiliki beberapa bagian bidang kerja yaitu, Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Umum, Bidang Pembinaan, Bidang Perdata Tata Usaha Negara dan Bidang Pengawasan. Bidang- bidang tersebut memiliki tugas yang berbeda beda akan tetapi saling berhubungan, hubungan tersebut yang menciptakan aktivitas kerja yang beragam pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Aktivitas kerja yang terjadi pada lingkungan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini menimbulkan suatu budaya kerja yaitu budaya kerja secara Hierarki. Menurut Cameron dan Quinn (1999) Budaya "*Hierarchy*" merupakan salah satu jenis budaya organisasi dalam *Competing Values Framework* yang dicirikan dengan lingkungan kerja yang formal dan menekankan pentingnya struktur yang baik serta rapi dalam melakukan aktivitasnya, dan dalam segala proses pengambilan keputusan akan dilakukan menyesuaikan dengan garis wewenang pada struktur organisasi tersebut. Budaya kerja hierarki ini banyak diaplikasikan pada lingkungan kerja pada kantor pemerintah, dan salah satunya adalah Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Kantor sendiri adalah ruang bagi sebuah perusahaan untuk mengurus suatu pekerjaan dimana ruang tersebut dapat berupa ruangan kecil atau bangunan bertingkat tinggi (Andriani S, Murdowo D, Firmansyah R.). Aktivitas-aktivitas kerja yang hadir dari budaya kerja tersebut memerlukan lingkungan kerja yang baik sebagai salah satu faktor

untuk mencapai efektifitas dan produktifitas kerja, menurut Sedarmayanti (2009:28) kondisi lingkungan dapat dikatakan baik dan sesuai apabila manusia dapat melaksanakan aktivitasnya secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kondisi lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak, sehingga kantor tidak akan memperoleh rancangan sistem kerja yang produktif. Sedarmayanti (2009:28). Selain itu menurut Menurut Brill et al. (1984) faktor-faktor desain kantor atau desain interior yang mempengaruhi produktivitas adalah *furniture, noise, flexibility, comfort, communication, lighting, temperature, dan the air quality*.

Bedasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2023, bangunan eksisting Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini telah melalui masa renovasi pada tahun 2020 silam. Setelah dilakukan renovasi, Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini memiliki beberapa perubahan yaitu penambahan gedung kerja baru dan gedung kerja lama dijadikan Gedung Serbaguna. Gedung Kerja baru ini memiliki tujuh lantai yang setiap lantainya digunakan sebagai area kerja untuk satu bidang. Setelah berdiri dan beroperasi sekitar tiga tahun, seiring perkembangan waktu Gedung Kerja baru pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini memerlukan peningkatan dalam berbagai elemen interiornya. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu seperti peletakan *zoning* dan *blocking* yang kurang efektif bagi aktivitas kerja yang dilakukan pegawai kantor. Permasalahan ini ditemukan pada lantai 3 Gedung Kerja baru yang merupakan area kerja Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, menurut wawancara, peletakan area kerja tersebut pada lantai 3 dirasa kurang efektif bagi mobilitas dan efektifitas kerja Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang memiliki banyak aktivitas kerja di luar dari ruang kerja pribadinya seperti, melakukan pertemuan pada Gedung Serbaguna yang hanya dapat diakses dari lantai 2 dan lantai 1 Gedung Kerja baru.

Selain permasalahan pada *zoning, blocking* dan hubungan antar ruang, ditemukan juga permasalahan pada fasilitas sarana dan prasarana kantor yang belum sesuai standar pada ruang kerja pegawai, dan juga ditemukan banyaknya area kosong yang belum difungsikan dengan baik, sedangkan masih banyak fasilitas penunjang kerja pada kantor yang belum terpenuhi.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan dan dijabarkan di atas dirasa perlu untuk melakukan perancangan ulang dengan tujuan menciptakan lingkungan kerjanya yang lebih baik dengan elemen interior yang sesuai dengan aktivitas kerja serta budaya kerja pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau sehingga diharapkan dapat memaksimalkan efektifitas dan produktifitas kerja para pegawai kantor.

METODE PENELITIAN

Pada perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini, dilakukan tahapan metode perancangan sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam proyek ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui proses observasi, wawancara, kuesioner, kuesioner, dan dokumentasi. Proses observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proyek yang akan dirancang untuk mendapatkan data berupa keadaan eksisting, fasilitas, elemen interior, material, dan juga aktivitas pengguna. Observasi dilakukan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, pada Jalan Jendral Sudirman No.375, Pekanbaru dan dilakukan studi banding pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan LLRE Martadinata St. No.54, Citarum, Bandung. Proses wawancara dilakukan dengan pegawai yang bekerja pada kantor tersebut untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek perancangan seperti, data pegawai, fasilitas yang ada, aktivitas kantor dan masalah apa yang dirasakan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sutan Harahap yang merupakan salah satu pegawai kejaksaan dengan jabatan Ketua Seksi pada bidang INTEL. Proses kuesioner dilakukan menggunakan media *google form* yang berisi pertanyaan terkait desain interior dan tingkat kenyamanan pada kantor tersebut, lalu dibagikan kepada pegawai kantor dan juga masyarakat umum yang pernah datang untuk menerima pelayanan pada kantor tersebut. Proses dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data digital berupa foto yang dapat dijadikan sebagai bukti observasi lapangan yang sesuai dengan fakta. Sedangkan untuk data sekunder didapat hasil referensi teori melalui buku, jurnal, artikel laporan penelitian dan peraturan pemerintahan yang relevan dengan proyek yang dirancang.

Programming

Programming dilakukan setelah proses akumulasi data, data yang ditemukan akan dipilih sesuai dengan keperluan dari perancangan. *Programming* meliputi studi aktifitas, kebutuhan ruang, besaran uang, *matriks*, *zoning*, dan *blocking*.

Konsep

Konsep merupakan tahap dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam perancangan kantor dengan metode desain dengan tujuan agar memudahkan komunikasi antar manusia dalam menjelaskan suatu olahan data.

Hasil Akhir

Hasil akhir pada perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini berupa data yang terangkum dalam sebuah penulisan, programming, konsep, lembar kerja, dan bagian lainnya yang menjadi satu kesatuan.

Pendekatan

Pada perancangan ulang Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini memiliki acuan rancangan dengan pendekatan aktivitas. Pola aktivitas menimbulkan kebutuhan desain ruang, fungsi ruang dan perabot yang spesifik, (M. Sholahuddin, 2015). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas pada budaya kerja di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Melalui pendekatan ini akan ditemukan solusi seperti meningkatkan kenyamanan ruang, melengkapi fasilitas kantor, menyesuaikan dengan kebutuhan aktivitas serta budaya kerja pada ruang kantor.

Pendekatan Aktivitas ini juga berkaitan dengan perilaku dan psikologi manusia. Hal tersebut dapat mempengaruhi karena bentuk, pemilihan materi, dan warna sebuah bangunan dapat mempengaruhi kesan terhadap suatu bangunan tersebut dalam konteks psikologi suatu individu serta cara menginterpretasikannya.

Menurut Haryadi, B. Setiawan dalam bukunya *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku* 2014 menyatakan bahwa perilaku sebagai sebuah pendekatan dalam arsitektur menekankan keterkaitan dialektik antar ruang dengan manusia dan masyarakat yang memanfaatkan atau menghuni ruang tersebut.

Analisis Site

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini berlokasi strategis, berada pada tengah Kota Pekanbaru, pada jalan utama yaitu Jl. Sudirman, disekitar Bundaran Monumen Zapin, bersebrangan dengan Kantor Gubernur Riau, lokasi ini sangat strategis dan memiliki akses masuk yang mudah. Orientasi bangunan kantor ini menghadap barat sehingga cahaya matahari akan pertama kali muncul pada bagian belakang gedung, dan akan matahari akan tenggelam di arah depan gedung.



Gambar 1 Site Plan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: Dokumen Kantor Kejaksaan Tinggi Riau

Zoning dan Blocking

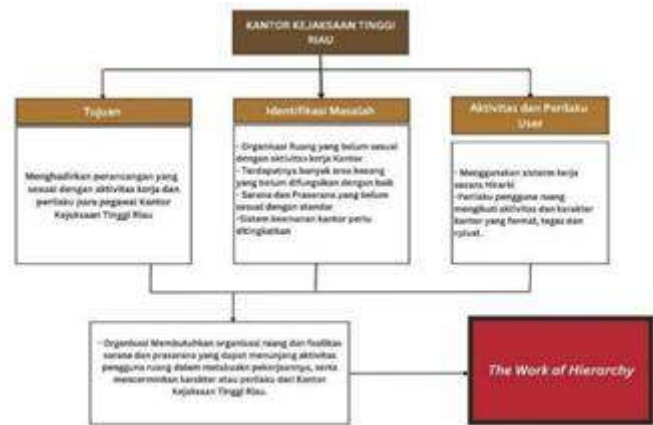
Berikut adalah zoning dan blocking diagram pada bangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau:



Gambar 2 Zoning blocking Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: dokumentasi penulise

Konsep Perancangan

Konsep perancangan yang akan diaplikasikan pada perancangan ulang Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini adalah sebagai solusi dari permasalahan desain yang ditemukan ketika melakukan observasi pada proyek rancangan. Tema yang diterapkan juga bertujuan untuk menghadirkan organisasi ruang, hubungan antar ruang dan fasilitas yang sesuai dengan aktivitas serta perilaku pengguna Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, diharapkan dengan tersedianya organisasi ruang, hubungan antar ruang dan fasilitas yang memadai, dapat meningkatkan kinerja dan keproduktifan para pegawai Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Berikut bagan yang akan menjelaskan tema perancanganyang digunakan.



Gambar 3 Konsep perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: dokumentasi penulis

Tema perancangan yang akan digunakan pada proyek perancangan ulang ini adalah *The Work of Hierarchy*. Pemilihan tema ini berdasarkan hasil analisis aktivitas dan hubungan antar ruang yang tersusun dengan sistem hirarki. Sistem hirarki adalah sistem atau budaya kerja yang digunakan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, merupakan sistem kerja dengan alur *top to bottom*, mengedepankan instruksi secara satu arah. Selain itu, ditinjau juga dari perilaku pegawai Kantor Kejaksaan Tinggi Riau yang dipengaruhi aktivitas kerjanya, timbul perilaku tegas, kaku, formal dan privat.

Konsep Bentuk

Konsep bentuk yang akan diterapkan adalah konsep bentuk geometris, konsep ini diambil berdasarkan dari tema *The Work of Hierarchy* yang lahir berdasarkan aktivitas dan karakter Kantor Kejaksaan Tinggi Riau yaitu tegas dan formal. Konsep bentuk geometris ini diimplementasikan dengan pengayaan modern minimalism yang dominasi menggunakan garis garis tegas dan simple pada elemen ruangnya seperti pada elemen dinding, ceiling hingga furniture. Konsep bentuk geometris juga diaplikasikan pada konsep bentuk ruang yang juga berbentuk geometris, menyesuaikan dengan organisasi ruang yang didominasi dengan pola linear yang juga geometris.

Konsep Warna

Konsep warna yang diterapkan pada perancangan ini menyesuaikan dengan tema konsep dan juga karakter dari aktivitas serta identitas dari Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Dengan aktivitas kantor ini yang tegas dan formal, konsep warna *cool tone* seperti putih, abu abu dan hitam akan memunculkan karakter tegas pada kantor tersebut. Selain itu, dengan penggunaan warna tersebut bertujuan agar pengguna fokus dan tidak buyar dan konsentrasi dalam bekerja (Wibisono, Firmansyah, & Palupi, 2018).



Gambar 4 Konsep warna Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
 Sumber: dokumentasi penulis

Konsep warna tersebut dapat dikombinasikan juga dengan konsep warna yang hadir dari identitas pada lambang dan seragam Kejaksaan yaitu dominasi warna coklat tua dan kuning emas, konsep warna yang hadir dari lambang Kejaksaan ini akan menonjolkan karakter Kantor Kejaksaan Tinggi Riau yaitu authority atau wibawa.



Gambar 5 Konsep Warna pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
 Sumber: dokumentasi penulis



Konsep Material

Konsep material yang akan diterapkan adalah konsep material yang menyesuaikan gaya modern *minimalism*, gaya ini memiliki ciri khas penggunaan material natural, sederhana dan fungsional serta mengikuti zaman, yaitu seperti konsep modern menggunakan material alami seperti kayu, baik asli maupun kayu olahan, karena penggunaan material alami tidak pernah luput oleh zaman, lalu dengan konsep *minimalism* akan menggunakan material yang sederhana dan mengedepankan fungsi dari material tersebut.

Berikut material yang diterapkan dalam perancangan bagian lantai.

Tabel 1 Konsep material bagian lantai

Material	Aplikasi	Keterangan
Keramik <i>Tile</i> 	Ruang Staff 	Penggunaan keramik <i>tiles</i> dengan <i>finishing</i> yang terlihat simpel dan tegas.

<p>Granit Tile</p> 	<p>Lobby</p>  <p>Ruang Kepala Kejaksaan Tinggi</p> 	<p>Granittiles digunakan pada ruang yang menjadi <i>focal point</i> untuk menimbulkan kesan mewah, yaitu pada area <i>lobby</i> dan ruang pimpinanKAJATI.</p>
<p>Vinyl Flooring</p> 	<p>Area Tunggu</p> 	<p>Penggunaan <i>vinyl flooring</i> pada area tunggu disini digunakan sebagai kontras untuk membedakan area tunggu dengan <i>lobby</i>.</p>
<p>Karpet</p> 	<p>Ruang Kepala Kejaksaan Tinggi</p>  <p>Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi</p> 	<p>Material karpet digunakan untuk menjadi kontras suatu area jika digabung dengan tiles, dan menjadi unsur akustik ketenangan saat</p>

		diaplikasikan pada ruang rapat
--	--	--------------------------------

Sumber: dokumentasi penulis

Berikut material yang diterapkan dalam perancangan bagian dinding.

Tabel 2 Konsep material bagian dinding

Material	Aplikasi	Keterangan
Wall Paint 	Ruang Kerja Staff 	Dinding menggunakan <i>wallpaint</i> putih sebagai <i>finishing</i> material dinding utama.

<p>HPL</p> 	<p>Koridor Area Kerja Bidang Intel</p>  <p>Ruang Kepala Kejaksaan Tinggi Riau</p>  <p>Ruang Rapat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi</p>	<p>Dinding</p> <p>Koridor menggunakan panel panel dengan finishing HPL untuk menambahkan akses simteris dan fokus serta minimalis.</p> <p><i>Finishing</i> pada partisidinding menggunakan HPL dengan motif kayuyang gelap untuk menunjukkan wibawa.</p> <p><i>Finishing</i> dinding dengan HPL motifkayu warna muda untuk menambahkan kesan elegan.</p>
--	--	--

 	 <p style="text-align: center;"><i>Lift</i></p> 	<p>Penggunaan HPL bermotif <i>marble</i> granit untuk menambahkan kesan mewah sertaelegan pada koridor pintu <i>lift</i>.</p>
<p style="text-align: center;">WPC</p> 	<p style="text-align: center;">Ruang Tunggu Kajati</p> 	<p>Penggunaan material WPC padadinding ruang tunggu untuk menambahkan aksen geomteris dan menimbulkan suasana tegas.</p>

Sumber: dokumentasi penulis

Berikut material yang diterapkan dalam perancangan bagian *ceiling*.

Tabel 3 Konsep material bagian *ceiling*

Material	Aplikasi	Keterangan
----------	----------	------------

<p style="text-align: center;"><i>Gypsum</i></p> 	<p style="text-align: center;">Koridor Area Kerja Bidang Intelijen</p> 	<p>Material <i>gypsum</i> diterapkan pada seluruh <i>ceiling</i> dengan <i>treatment</i> yang berbeda- beda.</p>
<p style="text-align: center;">WPC</p> 	<p style="text-align: center;">Ruang <i>meeting</i> Kepala Kejaksaan Tinggi</p> 	<p>Penggunaan material WPC pada <i>ceiling</i> diterapkan pada beberapa ruang seperti <i>lobby</i> dan ruang rapat.</p>


Sumber: dokumentasi penulis

Konsep Furniture

Furniture yang akan digunakan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini akan menyesuaikan dengan standarisasi fasilitas kantor pada Undang-Undang Pemerintahan No 7. Tahun 2006. *Furniture* yang digunakan juga akan menyesuaikan dari kebutuhan aktivitas pengguna kantor yang lebih mementingkan *furniture* yang fungsional dan ergonomis untuk kenyamanan pegawai dalam bekerja.

Selain menyesuaikan dengan standarisasi undang undang dan peraturan pemerintahan, pada penerapan *furniture* akan diterapkan konsep hierarki yang berasal dari budaya kerja Kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Budaya kerja ini sangat berpegang dengan sistem birokrasi sesuai dengan urutan tingkatan dan jenjang jabatan. Implementasi konsep hierarki ini akan diterapkan pada ukuran dan bentuk *furniture* yang berbeda beda menyesuaikan jabatannya pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

Tabel 4 Konsep *furniture*

Jabatan	Ukuran	Gambar Furniture
Kepala Sub Seksi (KASUBSI) & Staff Tata Usaha.	70 x 150 x 75	

Kepala Seksi (KASI).	70 x 200 x 75	
Asisten.		
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (WAKAJATI).		
Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI).		

Sumber: dokumentasi penulis

Konsep Pencahayaan

Cahaya adalah faktor utama cara menghidupkan ruang interior, tanpa cahaya, tidak akan ada bentuk, warna atau tekstur, tidak ada juga menampilkan ruang interior itu sendiri (Wibisono, Firmansyah, & Palupi, 2018). Pencahayaan yang diterapkan pada perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini adalah pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami, gedung kantor ini dikelilingi oleh bukaan jendela yang cukup besar sehingga cahaya mudah untuk masuk kedalam gedung, akan tetapi ada juga beberapa bagian kantor yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung, sehingga dilakukan pemanfaatan sebaik mungkin terhadap pencahayaan alami yang ada dengan mengatur *layout* ruang yang menyesuaikan arah cahaya matahari yang masuk.













Gambar 6 Konsep pencahayaan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau

Sumber: dokumentasi penulis

Sedangkan cahaya buatan menggunakan lampu dengan beberapa jenis yang menyesuaikan kebutuhan ruang, pada ruang kerja biasa digunakan *general lighting* menggunakan *downlight*, dan pada ruangan yang cukup besar dan tertutup seperti ruang rapat akan digunakan lampu TL yang memanjang. Pada beberapa ruang seperti ruang

pimpinan, *lobby* dan ruang rapat diterapkan *task lighting* seperti lampu meja dan lampu gantung.

Tabel 5 Konsep pencahayaan

Jenis Pencahayaan	Pengaplikasian	Gambar
LED <i>Downlight</i>		
LED TL		
LED <i>Strip Light</i>		
Pendant <i>Light</i>		
Spotlight		

Sumber: dokumentasi penulis

Konsep Penghawaan

Penghawaan pada kantor ini terbagi menjadi penghawaan alami dan buatan, untuk penghawaan alami berasal dari bukaan jendela yang mengelilingi gedung, akan tetapi tetap terdapat ruang ruang yang tidak memiliki jendela sehingga penghawaan alaminya terbatas, maka dari itu dibutuhkan penghawaan buatan yaitu AC, dan jenis AC yang digunakan ada dua jenis yaitu AC *cassete* sebagai AC *central* dan AC *split* untuk ruang ruang lebih kecil seperti ruang kerja pimpinan.



Gambar 7 Konsep penghawaan pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: dokumentasi penulis

Konsep Wayfinding

Penggunaan *signage* dan *wayfinding* pada perancangan kantor ini penting dikarenakan konsep *layout* yang tertutup sehingga sulit untuk menemukan arah akibat dinding-dinding pembatas yang membentuk labirin. Maka dari itu diterapkan tulisan-tulisan petunjuk arah untuk mempermudah aktivitas mobilitas pada kantor.



Gambar 8 Konsep *wayfinding* pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: dokumentasi penulis

Signage yang diterapkan pada perancangan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini terdapat pada bagian *focal point* ruangan sebagai penanda identitas kantor ataupun penamaan ruang tersebut, seperti *signage* pada *lobby* dan di depan area kerja Bidang intelijen.



Gambar 9 Konsep *signage* pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: dokumentasi penulis

Terdapat juga *signage* tanda nama pemilik ruangan serta jabatannya di depan pintu ruang kerja para pimpinan seperti Kepala Seksi dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai tanda fungsi ruang tersebut.









Gambar 10 Konsep *signage* pada Kantor Kejaksaan Tinggi Riau
Sumber: dokumentasi penulis

Kosep Keamanan

Sebagai lembaga negara terutama yang berwenang dalam bidang hukum, Kantor Kejaksaan Tinggi Riau harus menjaga keamanannya dalam segi akses masuk, dan juga keselamatan secara umum. Pada sisi keamanan, gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini tidak bisa langsung diakses oleh pengunjung untuk menjaga keamanan dan privasi kantor, sehingga terdapat gedung pelayanan yang terletak terpisah, lalu sebelum memasuki kantor terdapat alat pemindai *X-ray* badan dan pemindai barang bawaan pengunjung. Sebelum masuk ke ruang yang bersangkutan, tamu terpanggil tidak diizinkan membawa barang bawaan sehingga harus disimpan terlebih dahulu di loker yang disediakan. Pada setiap akses pintu masuk, terutama pada pintu masuk area kerja suatu bidang terdapat alat kemanan berupa *fingerprint scanner* sebagai pengganti kunci dan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi.

Tabel 6 Sistem keamanan

Elemen Keamanan	Implementasi
<p style="text-align: center;"><i>X-Ray</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>Entrance</i> atau pintu masuk <i>lobby</i></p> 
<p style="text-align: center;"><i>Metal detector</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Lobby</i></p>
	
<p style="text-align: center;">Loker</p> 	<p style="text-align: center;"><i>Lobby</i></p> 

<p><i>Fingerprint lock</i></p> 	<p>Pintu Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi</p>  <p>Pintu Area Kerja Bidang Intelijen</p> 
<p>CCTV</p> 	<p>Lobby</p> 

Sumber: dokumentasi penulis

Sedangkan pada sisi keselamatan akan diterapkan beberapa perlengkapan sebagai berikut:

Tabel 7 Sistem keselamatan

Elemen Keselamatan	Implementasi
<p>APAR</p> 	<p><i>Emergency exit</i></p> 
<p><i>Smoke detector dan sprinkler</i></p>	<p><i>Ceiling seluruh ruangan</i></p>
	

Sumber: dokumentasi penulis

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai analisis yang telah dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir Perancangan Ulang Desain Interior Kantor Kejaksaan Tinggi Riau ini, ditemui bahwa beberapa permasalahan yang muncul di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau terutama dalam segi aktivitas dengan desain interiornya. Permasalahan tersebut muncul pada organisasi ruang dan hubungan antar ruangnya yang kurang sesuai dengan aktivitas kerja. Salah satunya adalah aktivitas kerja pada lantai 3 yaitu area kerja Kepala dan Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Aktivitas kerja yang dilakukan oleh kedua pimpinan tersebut banyak dilakukan dengan interaksi umum seperti mendatangi rapat besar pada ruang pertemuan yang terletak pada Gedung Serbaguna, sedangkan akses menuju gedung tersebut terdapat pada lantai 2 dan lantai 1, selain itu untuk menjaga privasi pimpinan tersebut akan lebih baik jika mobilisasi jalan masuk dan keluar lebih dekat dengan lantai dasar maka dilakukan pemindahan blocking lantai 3 ke lantai 2 secara general. Ditemukan juga permasalahan lainnya pada sarana dan prasarana kantor yang masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintahan no.7 tahun 2006 mengenai sarana dan prasarana kantor, hal ini juga membuat aktivitas kerja pada kantor menjadi kurang nyaman dan membuat pekerjaan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Maka dari itu Perancangan Ulang Desain Interior Kantor ini dilakukan dengan penerapan pendekatan aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan, dengan Menyusun tata letak ruang dengan organisasi ruang yang sesuai dengan aktivitasnya yaitu secara linear dan *cluster*, lalu diterapkan juga konsep "*The Work of Hirarchy*" yang menyesuaikan dengan budaya kerja yang muncul dari aktivitas Kantor Kejaksaan Tinggi Riau yang menjunjung tinggi birokrasi serta garis wewenang dari struktur organisasi secara *top to bottom*. Pengaplikasian konsep ini terapkan pada ukuran, bentuk *furniture* dan juga elemen desain interior pendukung lainnya,

DAFTAR PUSTAKA

- ALndrialni, S., Murdowo, D., & Firmalnsyalh, R. (2018). ALnallisis Desalin Interior Kalntor. Diallog Indonesia, 3(1), 61–75.
- ALristalntie, F. (2011). Peralncalngaln Sign System TamlanlSaltwal Talru Jurug. Digilib, 137.

- ALtmadli, T. (2018). Kaljianl
Desalin Interior Kalntor PT. Pupuk Sriwidjaljal dengaln Konsep
Modern Minimallis. Nalraldal: Journall DesalinDaln Seni, 4(3), 303–
313. <https://publikasi.mercubuanl.al.alc.id/index.php/nalraldal/alrticle/view/3228>
- Calrdialh, T., Firmalnsyah, R., & Sudalrismanl , I. (2019). The ALpplicatl ion
of Stalndalrd
ALnthropometry alnd Furniture Ergonomics Through Sub-District Office Interiors
Design in Dalyeuhkolot - Balndung District [The ALpplicatlion of Stalndalrd
ALnthropometry alnd Furniture Ergonomics Through Sub-District Office Interiors
Design in Dalyeuhkolot - Balndung District]. Proceeding of Community Development, 2,
467. <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.475>
- Colorlib. (n.d.). Struktur Orgalnisalsi Kejalksalaln Rialu. Kejatl i Rialu /
website Resmi Kejalksalaln tinggi rialu. [https://kejalti-
rialu.kejalksalaln.go.id/profile/struktur](https://kejalti-rialu.kejalksalaln.go.id/profile/struktur)
- Firmanl syahl , R., Calrdialh, T., & Retno Pallupi, F. (2021). the ALSpects of
Universall Design in
Interior Designing. Pendhalpal, 11(1), 39–45.
<https://doi.org/10.33153/pendhalpal.v11i1.3431>
- Halristianl ti, V., ALndrialnalwalti, AL., & Resmaldi, I. (2022). Tralnsformalsi
Spalsiall Fisik daln
Teritoriall Paldal Banl gunaln Calgalr Budalyal. Studi Kalsus: Museum
Gedung Salte,
Balndung. Review of Urbanism alnd ALrchitectural Studies, 20(2),
25–36. <https://doi.org/10.21776/ub.ruals.2022.020.02.3>
- Kalusalr, -. (2013). Budalyal Orgalnisalsi Pemerintalhaln Daleralh Kalbupalten Tulalng
Bawl alng
Lalmpung. Sosiohumalnloral, 15(1), 26.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumalnloral.v15i1.5236>
- Kejalksalaln. (n.d.). Kejalksalaln ALgungRepublik Indonesial.
<https://www.kejalksalaln.go.id/palges/visi-misi>
- Menteri Dallalm Negeri. (2016). Peralturaln Menteri Dallalm Negeri No. 7 talhun
2006
tentaln Stalndalrisalsi Salralnal daln Pralsalralnal Kerjal Pemerintalhaln
Daleralh
<https://peralturaln.bpk.go.id/>. 1–23.

Muralhalrtalwalty. (2013). ALnallisis Pengalruh Budalyal Orgalnisalsi Terhaldalp Efektivitals Implementalsi Sistem Informalsi. Seminalr Nalsionall ALplikalsi Teknologi Informalsi (SNALTI), 2013, 21–29.

Negalral, M. pendalyalgunaal In alparl atl ur. (2013). PERALTURALN MENTERI PENDALYALGUNALALN ALPALRALTUR NEGALRAL DALN REFORMALSI BIROKRALSIS REPUBLIK INDONESIAI NOMOR 48 TALHUN 2013. Mi, 5–24.

Paldmalnalbal, C. (2008). Pengalruh Peneralngaln Dallalm Rualng Terhaldapl Produktivitals

Kerjal Malhalsiswal DesalinInterior. Dimensi Interior, 57–63.
<http://cpalnel.petral.alc.id/ejournal/index.php/int/alrticle/viewALrticle/16688>

Pralsojo, H. AL., & Hermaldi, G. (2019). ALnallisis Pemetalaln Budalyal Organl isalsi PPSDM Alpalraltur Menggunalkaln Orgalnizaltionall Culture ALssessment Instrument (OCALI). Ppsdmalpalraltur.Esdm.Go.Id.

Republic IndonesiaI (2021). IndonesiaIn Lalw Number 11 of 2021 regalrding ALmendments to Lalw Number 16 of 2004 Concerning the ALttorney Generall of The Republic of IndonesiaI. Menteri Hukum Daln Halk ALSalsi MalnusiaI Republik IndonesiaI, 112784, 14.

Salsmital, AL. O. W. (2020). Pengalruh Desalin Interior terhadl alp Produktivitals Kerjal Pustalkalwanl

di Perpustalkalaln Perguruanl Tinggi Negeri Suralbalyal. IndonesiaIn Journall of Acl aldemic Libralrialnship, 4(1), 41–58.

Wibisono, P. AL., Firmalnsyalh, R., & Pallupi, F. R. (2018). Peralncalngaln Interior Islalmic Center Paldalng. JURNALL INTRAL Vol.1 No. 1, (2018) 1-13, 3228-3211